



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SUSENO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 413894

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 827.512.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 321.344.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 163.592.000
3. Tanah Seluas 3837 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 184.176.000
4. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 79.200.000
5. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 79.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.885.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.885.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 128.950.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 455.580.038



F. HARTA LAINNYA	Rp.	290.000.000
Sub Total	Rp.	1.814.927.038
III. HUTANG	Rp.	109.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.705.527.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.